

PENGARUH DESENTRSLISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1991 - 2012

**Theresia Dyah Okta Raditya
Ign. Agus Wantara**

**Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

Abstrak: Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di suatu wilayah. Salah satu indikator sederhana untuk kesejahteraan rakyat adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kecenderungan yang terjadi di negara berkembang adalah ketimpangan wilayah meningkat searah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan dinas-dinas yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar wiayah di Daerah Istimewa Yogyakarta secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, (2) berlaku atau tidaknya hipotesis Kuznet berbentuk kurva U terbalik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kecenderungan meningkat setiap tahun pengamatan. (2) Hipotesis Kuznet mengenai kurva U terbalik berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta dan (3) Derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah serta derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci : *Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah.*

1. Pendahuluan

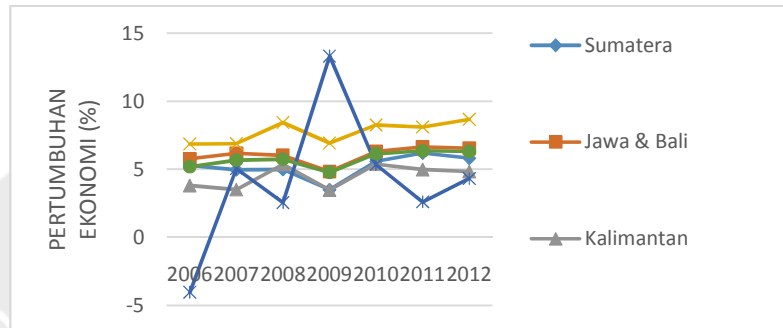
1.1. Latar Belakang

Krisis Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada awal masa Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1998, merupakan salah satu kekhawatiran di dalam perekonomian yang cukup menakutkan. Krisis yang terjadi pada masa itu akhirnya mendesak para pembuat dan pengambil keputusan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang mampu memperbaiki kondisi maupun kinerja perekonomian di Indonesia yang sempat terguncang. Para pembuat keputusan pun memutuskan untuk melaksanakan sebuah sistem yang sekiranya dapat membawa perbaikan ekonomi Indonesia, yaitu salah satunya dengan melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal.

Pelaksanaan kebijakan ini memiliki beberapa tujuan pokok, antara lain menghilangkan terjadinya kesenjangan (*imbalance*) yang ada baik kesenjangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun kesenjangan horizontal (*horizontal imbalanced*) yang terjadi antar daerah (Amir, 2012:16).

Salah satu hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal adalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia menjadi lebih mudah dicapai. Salah satu indikator yang paling sederhana untuk melihatnya

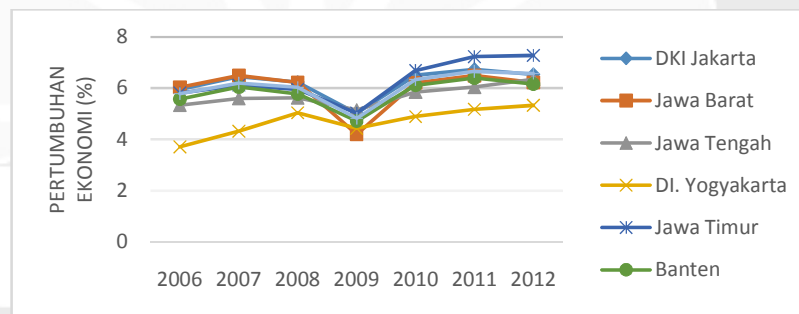
adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut akan semakin meningkat atau bisa dikatakan semakin membaik.



Gambar 1.1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2006-2012

Sumber : BPS Nasional, diolah (2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator melihat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dari Gambar 1.1 dapat terlihat selama tahun 2006-2012 bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi.



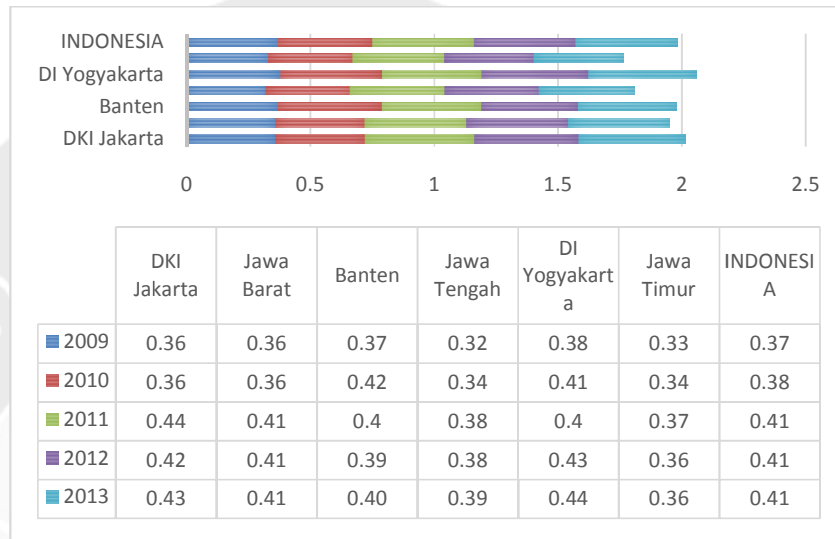
Gambar 1.2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006– 2012

Sumber : BPS Nasional, diolah (2013).

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut akan semakin meningkat. Perlu diperhatikan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, indikator lain yang dapat dipergunakan adalah tingkat distribusi pendapatan antarwilayah yang sering dikenal dengan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Hal tersebut dapat kita lihat pada Gambar 1.4 yang menjelaskan mengenai perkembangan tingkat ketimpangan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa provinsi yang memiliki peningkatan laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan Indeks Gini. Artinya,

ketimpangan ekonomi antar wilayah yang terjadi pada setiap provinsi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga dapat didefinisikan bahwa pada setiap provinsi di Pulau Jawa terjadi *gap* yang cukup lebar antara penduduk yang kaya dan penduduk yang miskin.



Gambar 1.4 : Indeks Gini Indonesia dan Provinsi yang Ada di Pulau Jawa Tahun 2009 - 2013

Sumber : BPS Nasional, diolah (2013).

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kinerja laju pertumbuhan yang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki indeks gini yang tinggi bahkan jika dibandingkan dengan nilai indeks gini nasional. Ini berarti ketimpangan ekonomi yang terjadi di provinsi ini cukup mengkhawatirkan. Hal ini berarti korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ekonomi terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Bagaimanakah hipotesis Kuznet berbentuk kurva U terbalik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Untuk mengetahui berlaku atau tidaknya hipotesis Kuznet berbentuk kurva U terbalik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh :

1. Pemerintah, sebagai salah satu sumber informasi dan masukkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan menyangkut pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah serta pengurangan ketimpangan yang terjadi antar wilayah.
2. Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi untuk penelitian yang terkait dengan riset ini.
3. Peneliti, sebagai salah satu sarana mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan peneliti selama perkuliahan dan menambah pengetahuan peneliti.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk beberapa hipotesis awal yang akan dibuktikan di dalam penelitian ini :

Ketimpangan Wilayah :

Hipotesis 1 : Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hipotesis 2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hipotesis 3 : Pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

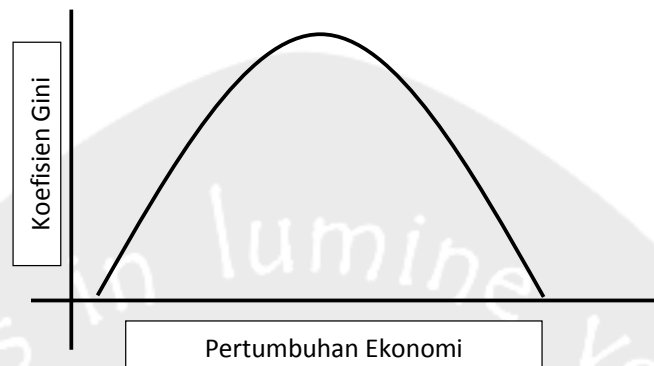
2. Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah

Simon Kuznet Simon Kuznet telah melakukan beberapa penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penelitian Kuznet yang dilakukan di negara berkembang menunjukkan sebuah fenomena yang kontras antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di beberapa wilayah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Kuznet mengenai *Inverted U Curve*. Teori tersebut menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi akan ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dibarengi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi

pula. Kondisi ini akan terjadi sampai pada titik krisis tertentu, di mana akan tercapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang akan semakin kecil. (Badrudin, 2012:137).



Gambar 2.1 : Kurva U Terbalik Hipotesis Kuznet
Sumber : Kuncoro, 2006 : 153.

Teori yang dikembangkan oleh Simon Kuznet jika dibandingkan dengan gambar di atas dijelaskan oleh beberapa faktor penyebab terjadinya hal tersebut berdasarkan pemikiran Simon Kuznet, dimana penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi, perubahan kesenjangan pendapatan, lingkaran pertumbuhan ekonomi yang dilewati ekonomi, dan memahami dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan.

2.1.2. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Wilayah

Kebijakan desentralisasi fiskal memiliki tujuan pokok, yaitu untuk menghilangkan kesenjangan yang ada, baik kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah maupun kesenjangan horisontal antardaerah di Indonesia. Selain itu tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan demokratisasi di Indonesia sehingga kekuasaan tidak hanya terpusat di suatu daerah. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada publik dan dapat memberikan efek penyebaran antardaerah (Amir, 2012:16).

Menurut Amir di dalam jurnal Warta Fiskal yang dirilis oleh Kementerian Keuangan menyatakan bahwa desentralisasi fiskal telah terlaksana selama hampir 12 tahun namun yang terjadi adalah secara agregat ukuran ketimpangan secara nasional menunjukkan indikasi yang semakin melebar. Beliau mengatakan bahwa konvergensi dalam perekonomian nasional akan terjadi jika daerah dengan PDB per kapita kecil mampu tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan rata-rata nasional. Selain itu di dalam jurnalnya, beliau juga mengatakan bahwa penelitian lainnya (Wibowo, 2011) menyatakan bahwa selama periode desentralisasi fiskal telah terjadi ketimpangan yang semakin melebar.

3. Metode Penelitian

3.1. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan beberapa instansi pemerintahan yang memiliki sumber data mengenai data-data yang berkaitan dalam penelitian ini, seperti Bappeda. Tahun pengamatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah tahun 1991 – 2012. Data yang akan digunakan merupakan data dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini merupakan beberapa definisi operasional variabel yang digunakan di dalam penelitian ini :

a. Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah di dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang terjadi antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghitungan tingkat ketimpangan wilayah adalah dengan menggunakan metode Indeks *Entropy Theil*.

b. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Boinet (2006)* dan *Sularmi dan Sarwono (2006)* dalam mengukur desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu menghitung derajat desentralisasi fiskal dari share penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah.

$$DF_{it} = \frac{PAD_{it}}{TPD_{it}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di dalam penelitian ini adalah melihat peningkatan dan perkembangan produksi barang dan jasa yang terjadi di suatu wilayah menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

$$g = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

3.3. Alat Analisis

Berikut ini merupakan beberapa alat analisis yang digunakan di dalam penelitian ini :

3.3.1. Indeks *Entropy Theil*

Indeks *Entropy Theil* digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumus untuk indeks tersebut adalah sebagai berikut ini (Kuncoro dan Sutarno, 2003:100):

$$IT = \sum \frac{Y_j}{Y} \times \log \frac{Y_j/Y}{X_j/X} \quad \dots\dots\dots (3.3)$$

3.3.2. *Ordinary Least Square (OLS)*

Penggunaan model ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh pertumbuhan ekonomi (G) dan derajat desentralisasi fiskal (DF) terhadap ketimpangan wilayah (KT) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.2.1. Model Metode *Two Stage Least Square* (TSLS)

Berdasarkan Gujarati (2009:192) untuk meregres menggunakan model OLS, bentuk model dasarnya adalah sebagai berikut ini :

$$KT_t = \beta_0 + \beta_1 G_t + \beta_2 DF_t + \mu_t \quad \dots\dots\dots (3.4)$$

di mana :

- KT = Ketimpangan wilayah (IT)
- G = Pertumbuhan Ekonomi
- DF = Derajat Desentralisasi fiskal
- μ = *error terms*
- t = menunjukkan periode waktu t di mana periode waktunya adalah tahun 1991 – 2012
- i = menunjukkan subjek di mana subjeknya adalah kabupaten/kota i yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.3. Uji Asumsi Klasik

Peneliti ingin mengetahui apakah model telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu yang menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian tang minimum (*Best Linear Unbiased Estimator* = BLUE) maka diperlukan beberapa pengujian menggunakan tiga asumsi, yaitu :

- a. Uji asumsi berkaitan dengan masalah adanya hubungan antarvariabel independen dalam regresi (uji multikolinearitas)
- b. Uji adanya varian variabel gangguan yang tidak konstan (uji heteroskedastisitas).
- c. Uji adanya hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi yang lain (uji autokorelasi).

3.3.4. Uji Statistik

Uji statistik yang dilakukan di dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, di mana dalam pengujian ini dapat dilihat pengaruhnya baik secara individu maupun secara bersamaan. Pengujian yang akan digunakan dalam tahap ini adalah uji t, uji F dan koefisien determinasi.

3.3.5. Trend *Non Linear* Kuadratik

Metode yang akan digunakan untuk melakukan pembuktian hipotesis Kuznet di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan menggunakan metode trend *non-linear* kuadratik dimana terdapat beberapa tahapan dalam membentuk persamaan trend *non-linear* kuadratik, yaitu:

1. Persamaan Umum

$$KT = a + bx + cx^2 \quad \dots\dots\dots (3.26)$$

2. Mencari nilai a, b, dan c terdapat beberapa rumus sebagai berikut ini :

$$a = \frac{(\sum KT)(\sum x^4) - (\sum x^2 KT)(\sum x^2)}{n(\sum x^4) - (\sum x^2)^2} \quad \dots\dots\dots (3.27)$$

$$b = \frac{\sum xKT}{\sum x^2} \quad \dots\dots\dots (3.28)$$

$$c = \frac{(\sum x^2 KT) - (\sum x^2)(\sum KT)}{n(\sum x^4) - (\sum x^2)^2} \dots\dots\dots (3.29)$$

3. Mencari nilai trend untuk pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah dari persamaan yang telah didapatkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Menggambarkan hasil trend yang telah didapatkan ke dalam bentuk grafik.

4. Analisis dan Pembahasan

Bagian ini akan dikemukakan mengenai hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut ini :

4.1. Analisis Ketimpangan Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta

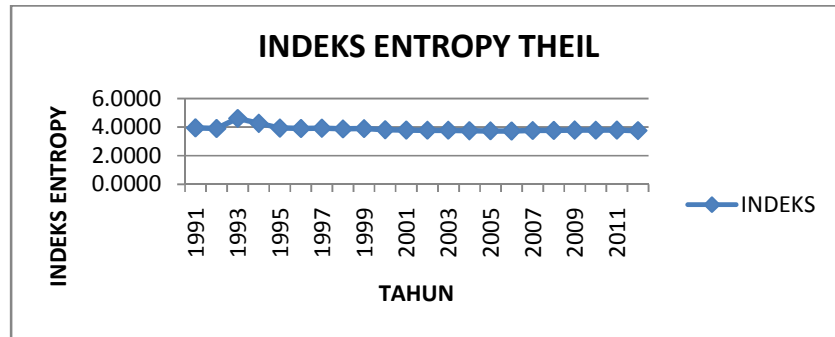
Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan yang terjadi di dalam suatu wilayah adalah indeks *Entropy Theil*. Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Tabel 4.1. : Indeks *Entropy Theil* Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991 – 2012

INDEKS <i>ENTROPY THEIL</i>	
TAHUN	INDEKS
1991	3,9392
1992	3,8957
1993	4,6116
1994	4,2633
1995	3,9262
1996	3,8997
1997	3,9196
1998	3,8652
1999	3,8870
2000	3,8110
2001	3,7934
2002	3,7754
2003	3,7748
2004	3,7444
2005	3,7294
2006	3,7249
2007	3,7575
2008	3,7594
2009	3,7847
2010	3,7801
2011	3,7820
2012	3,7496

Sumber : Hasil Analisis, Lampiran 5 Halaman 67-71.

Indeks ketimpangan *Entropy Theil* tidak memiliki batas atas maupun batas bawah, ketika nilai indeks *Entropy Theil* semakin besar berarti semakin timpang dan semakin kecil nilainya berarti semakin merata (Kuncoro, 2004:136). Berikut ini merupakan perkembangan Indeks *Entropy Theil* untuk kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1991 - 2012 :



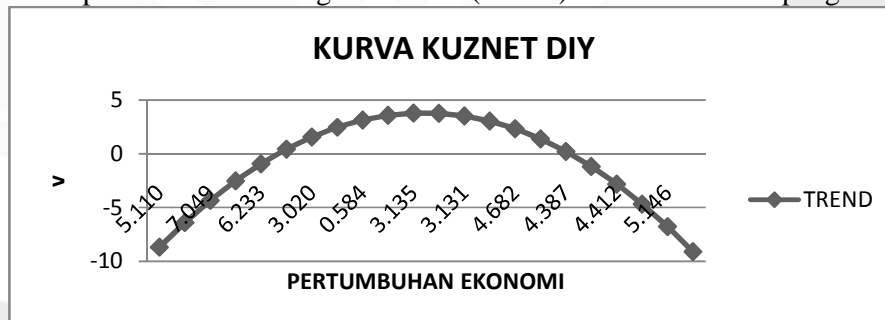
Gambar 4.1. : Perkembangan Indeks Entropi Theil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991 – 2012

Sumber : Hasil Analisis, Lampiran 6 Halaman 80.

Hasil indeks *Entropy Theil* di atas dapat terlihat bahwa tingkat ketimpangan wilayah pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi selama tahun pengamatan.

4.2. Pembuktian Hipotesis Kuznet tentang Kurva U Terbalik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kecenderungan terjadinya peningkatan indeks ketimpangan pada setiap kabupaten belum bisa dijadikan dasar pengambilan kesimpulan bahwa hipotesis Kuznet mengenai Kurva U yang terbalik telah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hipotesis Kuznet dapat dibuktikan melalui pembuatan grafik antara pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks ketimpangan.



Gambar 4.2 : Kurva Hubungan antara Indeks Entropi Theil dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1991 – 2012

Sumber : Hasil Analisis Lampiran 7 Halaman 73, diolah.

Pada kurva (Gambar 4.2) di atas berbentuk U terbalik. Hal ini berarti pada masa-masa awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan mengalami penurunan, tetapi pada suatu saat akan kembali terjadi peningkatan dan akhirnya akan mengalami penurunan lagi dan dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti mengalami pengulangan yang berarti bahwa hipotesis Kuznet mengenai kurva U terbalik berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.3. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut ini akan ditampilkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan model yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Tabel 4.2 : Hasil Regresi Ordinary Least Square (OLS) (Persamaan 3.4)

Dependent Variabel : KT (Ketimpangan Wilayah)			
Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
Konstanta	4.279687	27.48569	0.0000
Derajat Desentralisasi Fiskal (DF)	-0.010878	-3.164083	0.0051
Pertumbuhan Ekonomi (G)	0.016181	1.56851	0.1333
R- Squared	0.377184	F-statistik	5.753295
Adjusted R-Squared	0.311624	Probabilitas F-stat	0.011128

Sumber : Lampiran 8 Halaman 76.

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

Model yang digunakan untuk penelitian ini adalah model OLS sehingga pengujian ini perlu dilakukan.

4.3.1.1. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil deteksi multikolinearitas dapat dikatakan bahwa hasil regresi dari persamaan 3.4 tidak terdapat multikolinearitas karena nilai F-statistik ($0.252696 < F\text{-tabel } (3.13)$).

4.3.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pendeteksian heteroskedastisitas dapat dikatakan bahwa hasil regresi dari persamaan 3.4 tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilai dari probabilitas $\text{obs} \times R\text{-squared}$ ($0.1831 > 0.05$).

4.3.1.3. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pendeteksian autokorelasi di atas dapat dikatakan bahwa hasil regresi dari persamaan 3.4 tidak terdapat autokorelasi karena nilai probabilitas $\text{obs} \times R\text{-squared}$ ($0.4103 > 0.05$).

4.3.2. Uji Statistik

Pengujian yang dilakukan dalam uji statistik adalah uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi. Pada bagian ini akan dibahas mengenai uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi dari hasil regresi pada Tabel 4.5

4.3.2.1. Uji t

Pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan *degree of freedom* ($n-k = 22-5 = 17$) diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.10982. Pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan *degree of freedom* ($n-k = 22-6 = 16$) diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.11991 (Junaidi, 2014:2). Berikut ini adalah hasil uji koefisien regresi secara individual: Uji t merupakan uji untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan *degree of freedom* ($n-k = 22-3 = 19$) diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.09302 (Junaidi, 2014:2). Berikut ini adalah hasil uji koefisien regresi secara individual:

Pertama untuk konstanta. Berdasarkan hasil regresi di atas konstanta memiliki nilai t-hitung sebesar 27.48569 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 2.09302 sehingga H_0 ditolak yang artinya signifikan.

Kedua, variabel derajat desentralisasi fiskal memiliki nilai t-hitung sebesar -3.164083 lebih kecil jika dibandingkan dengan t-tabel 2.09302 sehingga H_0 tidak ditolak dan tidak signifikan. Artinya variabel derajat desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t-hitung 1.568551 lebih kecil jika dibandingkan dengan t-tabel 2.09302 sehingga H_0 tidak ditolak dan tidak signifikan. Hal ini berarti variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.3.2.2. Uji F

Pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan (3,19) maka didapatkan nilai F-tabel sebesar 3.13. Catatan $F_t = F_{\alpha(k-1, n-k)} = F_{0.05(3,19)} = 3.13$.

Berdasarkan hasil regresi maka didapatkan nilai F-statistik sebesar 5.753295 dan probabilitas F-statistik sebesar 0.011128. Nilai dari F-statistik dari hasil regresi ($5.753295 > F\text{-tabel } (3.13)$) sehingga H_0 ditolak artinya signifikan. Hal ini berarti variabel derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.3.2.3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil regresi (Tabel 4.2) di atas menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi sebesar 0.377184 yang berarti 37.7184 % variasi variabel ketimpangan wilayah mampu dijelaskan oleh variabel independen (derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi)..

4.3.3. Interpretasi Ekonomi

Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Berikut ini akan dipaparkan interpretasi hasil regresi yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil dari masing-masing persamaan baik persamaan untuk pertumbuhan ekonomi (Tabel 4.2).

Berdasarkan hasil regresi (Tabel 4.2) untuk nilai konstanta sebesar 4.279687, artinya tanpa adanya derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi maka tingkat ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 4.279687.

Kedua, variabel derajat desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Koefisien untuk variabel derajat desentralisasi fiskal adalah -0.010878 artinya jika derajat desentralisasi fiskal meningkat sebesar 1 persen maka akan mengakibatkan ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta turun sebesar 0.01 persen (*ceteris paribus*).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan wilayah yang masih terjadi di wilayah Indonesia. Derajat desentralisasi fiskal merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Sularmi dan Agus, 2006:31).

Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal bisa dikatakan bahwa pendapatan asli suatu daerah semakin banyak. Ketika pendapatan suatu daerah mengalami peningkatan diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah belanja daerah sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tersebut. Ketika pembangunan ekonomi semakin meningkat berarti ketersediaan faktor-faktor pendukung pelaksanaan kegiatan perekonomian di suatu wilayah akan semakin baik dan kabupaten/kota yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa melakukan akselerasi perekonomian sehingga perekonomian setiap daerah tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah terjadi ketimpangan yang terjadi antar wilayah semakin menurun.

Kedua, variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini beberapa faktor yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah, yaitu : kepemilikan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (Arsyad, 2010:288). Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta kemungkinan disebabkan oleh terdapat perbedaan kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota. Kualitas sumber daya manusia juga memungkinkan sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah. Ketika kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah semakin baik diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik untuk masing-masing kabupaten/kota. Namun untuk membuktikan apakah hal tersebut benar maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini :Ketimpangan wilayah yang terjadi pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk setiap tahunnya mempunyai kecenderungan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat dari indeks Entropi Theil masing-masing kabupaten/kota yang mengalami peningkatan. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi maka akan dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius.

- 1.) Ketimpangan wilayah yang terjadi pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk setiap tahunnya mempunyai kecenderungan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat dari indeks Entropi Theil masing-masing kabupaten/kota yang mengalami peningkatan. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi maka akan dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius.
- 2.) Hipotesis Kuznet mengenai kurva U terbalik berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti pada masa-masa awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan yang terjadi memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan mengalami penurunan, tetapi pada suatu saat akan kembali terjadi peningkatan dan akhirnya akan mengalami penurunan lagi dan dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti mengalami pengulangan.

- 3.) Pengolahan data menggunakan OLS dalam penelitian ini. Dari model OLS maka diperoleh hasil sebagai berikut : Pertama, untuk konstanta secara statistik signifikan. Variabel derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah. Variabel pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan beberapa masukan saran yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang muncul :

1. Untuk mengatasi ketimpangan wilayah sebaiknya pemerintah mulai memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pada masing-masing daerah.
2. Pemerintah masing-masing daerah perlu memperhatikan pembangunan kualitas sumber daya manusia pada masing-masing daerah.
3. Perlu adanya studi lanjut dengan memperhatikan efek jangka waktu yang terjadi pada variabel penelitian.

Daftar Pustaka

A. Buku Referensi

- Ariefianto, Moch. Dody. (2012). *Ekonometrika : Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Gujarati, Damodar N. (2009). *Basic Econometrics Fifth Edition*. Singapore : McGraw-Hill Companies, Inc.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Keempat*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2012). *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, Guritno. (2008). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sukirno, Sadono. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. (2008). *Statistik : Teori dan Aplikasi Edisi Ketujuh*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Tambunan, Tulus T.H. (2011). *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Cetakan Kedua. Bogor : PT Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. (2006). *Economic Development 9Th: Alih Bahasa oleh Haris Munandar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Kedua*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.

B. Brosur/Artikel

- Amir, Hidayat. (2012). "Ketimpangan Antar-Wilayah Melebar atau Merapat?" *Warta Fiskal*, V, hal 16-19, diakses dari http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/2010/kliping/wartafiskal/edisi_5_2012/files/edisi-5.pdf pada 05 Maret 2014.
- Apriesa, Lintangia Fajar dan Miyasto. (2013). "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Kabupaten / Kota di Jawa Tengah)." *Diponegoro Journal of Economics*, II(1), hal 1-12.
- Boinet, Jaime. (2006). "*Fiscal Desentralization and Regional Income Disparities : Evidence from the Columbian Experience.*" Springer, hal 661 – 676.
- Badan Pusat Statistik Nasional. Data Pertumbuhan Ekonomi, PDRB setiap Provinsi di Indonesia, Indeks Gini Tahun 2006 – 2013, diakses dari <http://www.bps.go.id> pada tanggal 05 Maret 2014.
- Caska. (2006). "Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antardaerah di Provinsi Riau."
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Data APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2000 – 2012, diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> pada tanggal 05 Maret 2014.
- Harefa, Mandala. (2012). Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah, diakses dari <http://www.berkas.dpr.go.id> pada tanggal 11 Agustus 2014.
- Junaidi. (2014). Titik Presentase Distribusi t d.f. = 1 - 200, diakses dari <http://junaidichaniago.wordpress.com> pada tanggal 11 Agustus 2014.
- Kuncoro, Mudrajad dan Sutarno. (2003). "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993 – 2000." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, VIII(2) Desember, hal 97-110.
- Laksmi, Chichi Shintia. (2010). "Analisis *Pro-Poor Growth* di Indonesia melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan," diakses dari <http://lib.ui.ac.id/> pada tanggal 29 September 2014.
- Nurana, Anggun Ciptasari dan Muta'ali. (2010). "Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning."
- Sianturi, Simonsen dan Miyasto. (2009). "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan antar wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.)"